

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Kesadaran Politik

a. Konsep Kesadaran Politik

Kesadaran politik berarti menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat atau situasi politik yang menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap hak dan kewajibannya di lingkungan masyarakat. Menurut Surbakti (2010: 184) kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal yang sama diungkapkan oleh Milbiath (2001 : 143) bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Sedangkan menurut Sasikala & Francisca (2017: 78) “*political awareness is the ability of human beings to acquire and possess political knowledge through perception, reasoning, or intuition*”. Kesadaran politik adalah kemampuan manusia untuk memperoleh dan memiliki pengetahuan politik melalui persepsi, penalaran, atau intuisi.

Bersandar dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran politik merupakan suatu kondisi kefahaman tentang pengetahuan politik, nilai-nilai, dan orientasi politik, yang memungkinkan seseorang untuk mencari solusi dari berbagai problematika dalam masyarakat, memberikan

keputusan dan menentukan sikap terhadapnya, sehingga dapat merubah atau mengembangkannya.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan tentang politik dan nilai-nilai konstitusi yang mengatur dalam kehidupan politik. Pengetahuan tersebut akan melahirkan suatu penghargaan terhadap sistem politik. Apabila telah terdapat suatu penghayatan terhadap konstitusi maka dengan sendirinya kesadaran atau ketaatan terhadap politik akan terwujud. Menurut Dja'far (2008: 3) kesadaran politik bukan berarti seseorang harus berkecimpung langsung dalam kegiatan politik praktis. Setidaknya mereka tahu, faham, memiliki sikap, serta sadar melalui sistem politik yang ada, ke arah mana mereka akan dibawa. Sehingga mereka tidak terombang-ambing tanpa daya. Dengan kata lain kesadaran politik tidaklah hanya diukur sebatas tindakan atau pelaksanaannya terhadap politik secara langsung, melainkan memiliki suatu pemahaman, sikap, serta mengerti akan tujuan dalam berpolitik itu juga dapat dikatakan sebagai kesadaran politik.

Kesadaran politik pada dasarnya menyangkut tentang pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Sehingga kesadaran politik dianggap penting dalam kehidupan bernegara mengingat kepentingan dan permasalahan dalam negara yang sangat kompleks. Maka dari itu, dibutuhkanlah dukungan yang positif dari masyarakat, sehingga kepentingan dan permasalahan dalam negara dapat diwujudkan dan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, aspek penting

dalam kesadaran politik adalah kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti halnya hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan, kesehatan pendidikan dan kewajiban-kewajiban dalam sistem politik, seperti kewajiban taat terhadap hukum, bersosialisasi baik dengan masyarakat, dan memahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan kewajiban lainnya. Sehingga nantinya kesadaran politik ini akan berkorelasi dengan partisipasi politik seseorang, semakin tinggi kesadaran politik seseorang, maka partisipasinya semakin aktif, begitupun sebaliknya (Cholisin & Nasiwan, 2012: 149).

Dari beberapa definisi kesadaran politik di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik adalah suatu konsep dasar seseorang yang ditandai dengan pemahaman, pengertian, dan penghayatan tentang sistem politik ditengah-tengah lingkungan masyarakat di sekitarnya, sehingga berdampak positif terhadap perilaku atau tindakan untuk mentaati sistem politik, aturan hukum, dan norma-norma dalam masyarakat termasuk mengerti atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

b. Indikator Kesadaran Politik

Indikator kesadaran politik menjadi acuan untuk mengukur seberapa tinggi taraf kesadaran politik seseorang, atau dengan kata lain, merupakan alat untuk mengukur kesadaran politik seseorang. Surbakti (2010:184) berpendapat bahwa indikator kesadaran politik dapat dilihat dan ditentukan dari definisi, kedudukan, dan posisinya. Kesadaran politik

menjadi faktor penentu terhadap tingkat partisipasi politik dan kepercayaan terhadap politik. Kesadaran politik berorientasi pada aspek psikologi seseorang mengenai kesadarannya terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Maka dari itu tolok ukur untuk mengetahui kesadaran politik ada dua hal, yaitu: 1. Mengenai pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat tempat tinggalnya; 2. Mengenai minat dan perhatian seseorang terhadap situasi politik di lingkungannya.

Pendapat yang serupa diungkapkan oleh Fatwa (2016: 16-18) bahwa untuk mengukur kesadaran politik, indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 1. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate/sah. 3. Kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik. 4. Kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik. Menurut Amer (2009:359) *“Political awareness refers to how much factual information voters have about politics”*. *“On the whole, political awareness means access”*. Kesadaran politik mengacu pada seberapa banyak informasi pemilih memiliki fakta tentang politik. Secara keseluruhan, kesadaran politik berarti akses.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang indikator kesadaran politik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tiga indikator kesadaran politik, yaitu 1. Pengetahuan seorang warga negara terhadap politik, 2. Sikap seorang warga negara terhadap situasi politik, 3. Tindakan atau

implementasi dari sebuah pengetahuan dan sikap seseorang warga negara terhadap hak dan kewajibannya ditengah-tengah masyarakat.

c. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Politik

Surbakti (2010: 185) mengatakan kesadaran politik menjadi salah satu variable penentu partisipasi politik seseorang disamping kepercayaan politik. Kesadaran politik tidaklah menjadi variabel yang berdiri sendiri atau dengan kata lain bukan variabel yang independen. Ada faktor-faktor lain yang memengaruhi kesadaran politik, antara lain. 1. Status sosial; 2. Status ekonomi; 3. Afiliasi politik orang tua; 4. Pengalaman berorganisasi. Empat faktor ini lah yang menentukan tinggi rendahnya kesadaran politik seseorang sehingga akan berdampak pada partisipasi politik.

Menurut Asfar (2006: 137-141) terdapat dua model atau pendekatan dalam memandang faktor-faktor apa yang memengaruhi kesadaran politik seseorang. Pendekatan pertama sering disebut sebagai mahzab Columbia dengan menekankan pada faktor-faktor sosiologis dan yang kedua disebut dengan mahzab Michigan dengan menekankan pada faktor-faktor psikologis. Faktor sosiologis mengarah pada karakteristik sosial seperti pekerjaan atau profesi, pendidikan, dan lain-lain. Serta dari latar belakang sosial seperti agama, wilayah, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan faktor psikologis berkaitan dengan tiga aspek yang merupakan kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu sistem politik dengan berbagai instrument dan institusinya, orientasi terhadap isu-isu,

serta orientasi terhadap aktor politik. Pirannejad & Janssen (2017:11-12) berpendapat bahwa:

...which includes three sub-categories that contribute to influences the political awareness of citizens. The first subcategory was 'providing digital information'. The second subcategory was 'development of political parties'. The third subcategory was 'development of social networks.

Ada tiga cakupan sub-kategori yang dapat memengaruhi kesadaran politik warga negara. Subkategori pertama adalah 'memberikan informasi digital'. Subkategori kedua adalah 'pengembangan partai politik'. Subkategori ketiga adalah 'pengembangan jejaring sosial'. Jadi dapat dikatakan ada tiga faktor yang dapat memengaruhi kesadaran politik warga Negara, pertama informasi digital, kedua partai politik, dan yang ketiga jejaring sosial. Selain media sosial, figuritas dari seorang tokoh atau bahkan selebritis dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan dan menumbuhkan kesadaran politik seseorang. seperti yang diungkapkan oleh Jones's (Click et al., 2017:614) bahwa:

...assertion that celebrities can encourage fans to follow in their footsteps, the Little Monsters we interviewed used social media to create supportive social networks and to directly help others, following Lady Gaga's aggressive use of social media to discuss her views and raise political awareness.

Jones's Menegaskan bahwa selebritas dapat mendorong penggemar untuk mengikuti jejaknya, Little Monsters yang kami wawancarai menggunakan media sosial untuk menciptakan jejaring sosial yang mendukung dan untuk secara langsung membantu orang lain, pengikut

media sosial Lady Gaga yang agresif mengungkapkan pandangannya dan menumbuhkan kesadaran politik.

Ruslan (2000: 97) berpendapat bahwa faktor yang memengaruhi kesadaran politik adalah. 1. Jenis kultur politik, individu itu tumbuh darinya/dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya, 2. Berbagai revolusi dari perubahan budaya yang terjadi di masyarakat, 3. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya, 4. Adanya pemimpin politik, sejumlah tokoh politik yang genius yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat. Pasek, & Kenski (2006: 132) berpendapat “*that mass media play a powerful role in facilitating shared interests in youth and ultimately help to promote more civic and political action than would otherwise occur*”. Media massa memainkan peran yang kuat dalam memfasilitasi kepentingan bersama dalam pemuda dan pada akhirnya membantu untuk mempromosikan lebih banyak aksi sipil dan politik daripada yang seharusnya terjadi. Coles (Blankemeyer et al., 2009:229) “*proposed that political awareness is a developmental process that varies across societal contexts and is influenced by various sources, such as parents, peers and the media*”. Coles mengusulkan bahwa kesadaran politik adalah proses perkembangan yang bervariasi di seluruh konteks masyarakat dan dipengaruhi oleh berbagai sumber, seperti orang tua, teman sebaya dan media.

Sedangkan menurut Almond & Verba (1984: 70) kesadaran politik seseorang dapat dilihat dari kesadaran outputnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang terkait dengan dua hal utama, yaitu tingkat pencapaian pendidikan dan kedudukan sosial ekonomi. Tingkat pencapaian pendidikan maksudnya adalah terkait dengan jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang. Sedangkan kedudukan sosial ekonomi mengarah pada keadaan perekonomian seseorang dan status sosialnya seperti profesi, mata pencaharian, pekerjaan dan lain sebagainya. *“That responsiveness is a function of political awareness (which facilitates reception) with the more politically aware changing the most”* (Claassen & Highton, 2009:541). Responsif itu adalah fungsi dari kesadaran politik (yang memfasilitasi penerimaan) dengan perubahan politik yang paling sadar.

Dari beberapa pendapat tentang faktor yang memengaruhi kesadaran politik, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua garis besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan keadaan individu yang bersangkutan, yaitu kondisi psikologis seorang individu yang mencakup tentang kondisi emosional terhadap suatu sistem politik baik pada instrumen maupun institusinya, orientasi terhadap situasi politik, dan orientasi terhadap tokoh atau aktor politik. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi yang ada di luar individu, yaitu faktor status sosial, seperti tingkat

pendidikan, kondisi perekonomian, pekerjaan, profesi, kedudukan dan lain sebagainya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kesadaran politik adalah pada dukungan atau pilihan seseorang terhadap calon pemimpin yang akan dipilih dalam pelaksanaan pemilihan umum, seperti yang diungkapkan oleh Klačnja (2017: 261) bahwa *“support for corrupt incumbents relative to clean incumbents increases as political awareness increases”*. Dukungan untuk petahana korup relatif berkurang terhadap petahana bersih dengan meningkatnya kesadaran politik. Aktor politik atau yang disebut sebagai perencana dalam perpolitikan sangat membutuhkan kesadaran politik dari para pendukungnya, sehingga agenda atau rencana dalam politik tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Grange (2012:240) *“there is a need for a new political awareness among planners”*. Ada kebutuhan akan kesadaran politik baru di antara para perencana. Goren (2012:807) mengatakan bahwa *“political awareness allows one to better link one’s predispositions to policies, candidates, or parties”*. kesadaran politik memungkinkan seseorang untuk lebih memiliki kecenderungan dengan kebijakan, kandidat, atau partai.

Faktor jenis kelamin (*gender*) juga dapat memengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang, seperti yang diungkapkan oleh Ahmed et al. (2015:67) *“the level of political awareness among the female students was comparatively low as compare to the male respondents”*. Tingkat

kesadaran politik di kalangan siswi relatif rendah dibandingkan dengan responden laki-laki. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Kuotsu (2016:197) “*a high impact of political awareness on men voters’ participation in electoral activities but a limited impact on political awareness on women voters*”. Terdapat pengaruh tinggi kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih pria dalam kegiatan pemilihan umum, tetapi terdapat dampak terbatas pada kesadaran politik pada pemilih perempuan. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ebrahimi (2016: 262) “*that meaningful correlation exists between level of political awareness of women and their degree of social participation*”. Ada korelasi yang berarti antara tingkat kesadaran politik perempuan dan tingkat partisipasi sosial mereka.

2. Tinjauan tentang Pendidikan Politik

a. Istilah Pendidikan Politik

Menurut Kartono (2009: 63), Pendidikan politik disebut sebagai “*political forming*” atau “*politische Bildung*”. Dikatakan *Forming* karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status politiknya di tengah masyarakat. *Bildung* adalah pembentukan atau pendidikan diri sendiri, karena menyangkut aktivitas individu untuk membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. “*Political education is an essential component of democratic education*” (Quraishi & Rahman, 2009: 25).

Pendidikan politik menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan demokratis.

“For some educators, the term political education expresses an ambiguity that needs to be eliminated. They claim that the term is oxymoronic, and implies a meaning like education is political” (Frazer, 2010: 11). Bagi sebagian pendidik, istilah pendidikan politik mengungkapkan kerancuan yang perlu dihilangkan. Mereka mengklaim bahwa istilah itu bersifat oxymoronic, dan menyiratkan makna seperti "pendidikan adalah politik". Sedangkan menurut Komsuoglu (2014: 3) bahwa:

In a wide range extending from Ancient Greek to Eastern Philosophy, from enlightenment philosophy to democratic theory, almost all significant thinkers of the political field established a connection between politics and education, and wrote texts that problematize that relationship.

Dalam rentang yang luas mulai dari Yunani Kuno hingga Filsafat Timur, dari filsafat pencerahan hingga teori demokrasi, hampir semua pemikir penting bidang politik memiliki hubungan antara politik dan pendidikan, dan menarasikannya yang mempermasalahkan hubungan itu. Dengan kata lain politik dan pendidikan memiliki keterikatan yang kuat.

Pendidikan politik pada dasarnya merupakan bagian penting dalam pendidikan demokratis dan bagian dari pendidikan individu yang matang, karena pendidikan ini tidak menekankan individu menjadi seorang yang ahli dibidang politik, akan tetapi menekankan individu agar dapat berinteraksi atau membangun relasi dengan individu lain, atau individu

dengan masyarakat di tengah medan sosial dengan konteks politik yang memiliki macam-macam perbedaan atau kemajemukan kepentingan.

b. Definisi Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik. Pendidikan politik merupakan upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik (Kartono, 2009: 64).

Ranjabar (2014: 182) mengemukakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa yang khusus mengarah pada upaya membina kemampuan aktualisasi diri, yaitu mengaktualisasikan segala bakat dan kemampuan, sehingga orang bisa berkembang, aktif, kreatif, berkarya dan berprestasi secara bertanggung jawab. Pendidikan politik sebagai bentuk kegiatan edukatif sistematis internasional untuk mengarahkan orang dewasa agar aktif berpartisipasi dalam politik.

Pendidikan politik merupakan faktor penting untuk membentuk kesadaran politik warga negara atau seorang individu. Kesadaran politik yang tinggi membentuk sikap politik seseorang yang mendukung sistem suatu pemerintahan. Wuryan (2008:72) menyatakan bahwa pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesadaran warga negara untuk

memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya. Pendidikan politik yang dilaksanakan dengan baik, terencana, terprogram, terarah, terkendali, terkoordinasi, akan berkontribusi positif bangsa pengembangan kesadaran politik atau melek politik (*political literacy*).

Political (self-)education is not concerned merely with acquiring political knowledge and the skills needed for active public life, but is primarily about learning, which is achieved through respecting and practicing certain principles, norms, values, attitudes, and habits (Clark, 2017: 64).

Pendidikan politik bagi setiap individu tidak hanya berkaitan dengan memperoleh pengetahuan politik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan umum secara aktif, tetapi diperlukan pula untuk belajar, menghargai dan memiliki prinsip, norma, nilai, sikap, dan kebiasaan tertentu.

A different perception of politics and individuals involvement in public discourse, a politics of learning, trial and error, seem necessary if a change of attitude to politics and political engagement in democratic societies of today is supposed to take place (Stoker, 2017: 218).

Persepsi yang berbeda tentang keterlibatan politik dan individu dalam wacana publik, politik pembelajaran, *trial and error*, tampaknya diperlukan jika perubahan sikap terhadap politik dan keterlibatan politik dalam masyarakat demokratis saat ini dianggap terjadi. Menurut Kantaprawira (2006: 55) pendidikan politik merupakan suatu jenis pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar dapat berprestasi secara maksimal dalam sistem politik. Seorang individu diarahkan agar

dapat meningkatkan kesadarannya, mampu memahami persoalan dan tantangan politik serta memberikan solusi yang terbaik.

Pendidikan politik menurut Handoyo & Lestari (2017: 12) merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. *“Educational system in different countries involves lesson or lessons aimed at bringing political knowledge in students”* (Kuş & Tarhan, 2016: 464). Sistem pendidikan di berbagai negara melibatkan pelajaran atau pelajaran yang ditujukan untuk pengetahuan politik siswa.

Sementara itu Surbakti (2010: 150) berpendapat bahwa pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik, yakni proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses itu masyarakat bisa mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik. Kegiatan pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti bimbingan, pengajaran, dan latihan seperti kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum (Purwastuti, 2010: 33).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan suatu upaya edukasi secara sistematis dan internasional untuk membentuk kesadaran individu dan masyarakat luas

pada umumnya, supaya faham akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai warga negara, selain itu juga agar mengerti nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik agar terciptanya sistem politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Ranah Pendidikan Politik

Pendidikan politik memiliki berbagai ranah di dalamnya, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, seperti yang diungkapkan oleh Handoyo & Lestari (2017: 15-54) antara lain:

1. Aspek Kognitif

Salah satu aspek yang menjadi tujuan pendidikan politik adalah aspek kognitif yang arahnya adalah membangun pengetahuan politik warga negara (*civic knowledge*). Pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap konsep-konsep politik dasar tertentu menjadi sangat penting untuk dibangun, karena tanpanya kesadaran politik yang kritis tidak mungkin ditumbuhkan.

2. Aspek Afektif

Pendidikan adalah proses mengenalkan dan menguatkan nilai-nilai tertentu pada seorang warga negara. Nilai-nilai yang disampaikan dalam pendidikan politik adalah nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kebebasan, nilai tanggung jawab, kemandirian (mewujudkan diri sendiri), hak untuk menentukan diri sendiri, partisipasi (turut menentukan), toleransi,

pertolongan agar bisa menolong diri sendiri, pluralisme, kemajuan serta perdamaian.

3. Aspek Psikomotorik

Kecakapan intelektual yang menjadi dasar bagi warga negara yang bertanggung jawab dan terdidik (sadar informasi) sering disebut sebagai kecakapan berpikir kritis. Kesadaran dianggap penting karena tidak mungkin membangun kecakapan berpikir kritis tanpa terlebih dahulu dibangun kesadaran kritis. Kesadaran kritis akan membawa warga negara kepada cara pandang yang lebih luas tentang suatu persoalan, sehingga suatu persoalan bisa diidentifikasi dan dianalisis secara tepat.

d. Tujuan Pendidikan Politik

Suatu pendidikan pastilah memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai atau didapatkan, seperti halnya pendidikan politik, ada tujuan-tujuan tertentu di dalamnya. Adapun tujuan pendidikan politik tersebut adalah seperti apa yang diungkapkan oleh Handoyo & Lestari (2017: 15) pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Bagitu pula menurut Soeharto (2011: 329), tujuan pendidikan politik adalah membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik pada diri warga negara. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ruslan (2000:87) bahwa tujuan pendidikan politik adalah. 1) membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, dan 2) membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada diri individu agar individu dapat menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Dag et al. (2015: 1886) berpendapat bahwa:

...political education wishes to succeed in is to support the children in realization of their political existence and political subjectivity; to develop their political awareness; to ensure that they are raised as individuals with political awareness required for a freer and more democratic future; to assist their organization around participatory lines allowing them to become effective citizens, and to contribute to their shaping the political culture of the future.

Pendapat tersebut mengandung makna pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan subjektivitas politik generasi muda. Untuk mengembangkan kesadaran politik mereka, dipastikan bahwa mereka dibesarkan sebagai individu dengan kesadaran politik yang diperlukan untuk masa depan yang lebih demokratis dan lebih bebas. Agar mereka dapat berpartisipasi dalam sebuah organisasi yang memungkinkan mereka untuk menjadi warga negara yang efektif, dan memberikan kontribusi untuk membentuk budaya politik mereka di masa depan.

Pendidikan politik pada generasi muda bertujuan untuk memberikan pengetahuan, memberikan suatu penilaian dan

meningkatkan partisipasi mereka pada politik. Seperti yang diungkapkan oleh Balzter et al. (2017: 23) *“knowledge, judgment, action the so called triad of political youth education refers to its sub goals: to impart knowledge, to enable judgement and to encourage participation”*.

Adapun menurut Kartono (2009: 68) tujuan dalam politik terdiri dari berbagai macam, antara lain. 1) Menjadikan individu. a) Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik, b) Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap, c) Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara, d) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. 2) Memperhatikan dan mengupayakan. a) Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara melaksanakan realisasi diri atau aktualisasi diri dari dimensi sosialnya, b) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya, yaitu aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik, c) Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara. Menurut Reeves (2018: 1-15) bahwa:

...political education as primarily self-education, a process of learning that aims at greater political awareness, empowerment, and better judgment on political issues. As such, political (self-) education can be seen as liberating and

as a necessary condition of active political involvement, community service, citizenship, civic intelligence and political liberty.

Pendapat tersebut mengandung makna pendidikan politik terutama pada diri sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik, yaitu dengan pemberdayaan dan penilaian yang baik terhadap isu-isu politik. Dengan demikian pendidikan politik diri sendiri dapat dilihat sebagai pemberian kebebasan dan pentingnya keterlibatan politik secara aktif, pengabdian, kewarganegaraan, kecakapan, dan kebebasan politik. Sementara itu, Yuen & Leung (2010: 109) mengatakan:

...political education can serve different purposes in different polities. If political education is meant to support the development of a democratic system with a representative government and respect for human rights, it seems that the political education concerned should allow the students to develop both an interest in politics and the capability to make informed judgment about political issues independently.

Pendidikan politik dapat digunakan sebagai tujuan di berbagai negara. Jika pendidikan politik dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sistem demokrasi dengan pemerintah perwakilan dan menghormati hak asasi manusia, pendidikan politik harus mampu untuk meningkatkan partisipasi politik dan kemampuan untuk membuat penilaian tentang masalah politik secara mandiri pada para siswa.

e. Metode dan Media Pendidikan Politik

Handoyo & Lestari (2017: 131) membagi metode pendidikan politik menjadi tiga macam, yaitu pendidikan politik secara formal, non formal dan informal. Metode pendidikan formal biasanya digolongkan dalam tiga tingkatan yaitu primer, sekunder dan tersier di mana pemerintah bertindak sebagai penanggung jawabnya. Pendidikan non formal adalah segala bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sistematis dan diselenggarakan di luar sistem formal untuk memberikan pola-pola pembelajaran kepada anggota kelompok dalam suatu populasi (masyarakat) baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak, sedangkan metode pendidikan informal adalah metode pendidikan yang tidak terorganisasi dan biasanya juga tidak sistematis.

Khoiron (1999: 128-129) juga berpendapat tentang metode dalam pendidikan politik, yaitu terdiri dari berbagai macam, antara lain. a) Bursa gagasan (*brainstorming*), yakni memunculkan gagasan secara mendadak, kemudian memulai diskusi berdasarkan gagasan tersebut, b) Buzz groups, di mana masing-masing partisipan beralih kepada rekan disamping kiri atau kanannya, dan kemudian melakukan diskusi singkat satu lawan satu, c) Studi kasus, di mana partisipasi membuat deskripsi tentang bagaimana suatu masalah yang pernah muncul di masa lalu dihadapi dan ditanggapi masyarakat, d) Debat. Dalam hal ini, partisipan mengambil posisi yang berbeda satu sama lain, bersikap sebagai oposisi atas suatu masalah dan mengajukan

argumentasi yang berbeda dengan yang lainnya, e) Pengharapan, yaitu suatu metode di mana partisipan menyatakan apa yang diharapkannya, f) Diskusi terbuka, di mana setiap partisipan dapat berbicara tanpa interupsi.

Sedangkan media yang digunakan dalam pendidikan politik, menurut Handoyo & Lestari (2017: 133) terdapat dua model, yaitu media langsung dan media tidak langsung. Media langsung yaitu masyarakat terlibat secara langsung, kritis dan otonom dalam proses-proses pendidikan yang dilaksanakan, misalnya berbentuk diskusi, pelatihan, workshop, debat terbuka, yang semuanya diarahkan pada materi-materi pendidikan. Media tidak langsung merupakan media dimana warga negara tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan. Media ini biasanya dipakai dalam proses pendidikan yang dilaksanakan secara massal dengan tujuan membangkitkan kesadaran warga negara atau memberi informasi penting kepada mereka tentang isi publik tertentu yang harus diperhatikan bersama. Media ini digunakan misalnya untuk menyebarkan informasi secara massal misalnya membuat spanduk, selebaran, leaflet, newsletter, memasang iklan di media massa, menyebarkan informasi lewat internet, dan sebagainya.

The mediation of political education must be understood relationally and that “teacher as community organizer” is an important and emergent paradigm in social justice teacher education. Implications for social justice teacher education and research on the development and sustainability of social

justice educators are suggested (Zavala & Henning, 2017: 1-27).

Pendapat tersebut mengandung makna bahwa media pendidikan politik dipahami sebagai keterkaitan guru sebagai bagian dari masyarakat adalah paradigma penting dan muncul dalam pembentukan guru sebagai wujud keadilan sosial. Implikasi dari keadilan sosial adalah guru sebagai pendidik, peneliti, dan berkesinambungan dalam pendidikan keadilan sosial.

f. Lembaga-Lembaga Pendidikan Politik

Seperti apa yang telah singgung di atas tentang pembagain metode pendidikan politik, Handoyo & Lestari (2017: 133) berpendapat bahwa pendidikan politik dapat diberikan melalui lembaga penyelenggara pendidikan formal seperti sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selain itu, negara merupakan lembaga yang efektif juga memberikan pendidikan politik pada warga negaranya, misalnya dalam penyelenggaraan pemilu yang memilih wakil-wakil rakyat, dan sebagainya. Adapun lembaga-lembaga pendidikan politik yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan politik menurut Handoyo & Lestari yaitu keluarga, sekolah, partai politik, kelompok penekan, serta media informasi dan komunikasi publik.

3. Tinjauan tentang Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa atau peserta didik dengan guru, teman, orang tua dan sumber belajar yang lain di lingkungan sekolah

dan tempat tinggalnya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendapat yang serupa diungkapkan Isjoni (2012:14) bahwa pembelajaran adalah upaya seorang pendidik untuk membantu peserta didik melakukan proses belajar.

Menurut Susanto (2013: 19) bahwa pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik. Sedangkan menurut pendapat Usman (2013: 12) bahwa:

Pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat difahami bahwa pembelajaran adalah serangkaian perbuatan atau interaksi yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh pendidik dan peserta didik dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan, penguasaan, kemahiran, tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan.

Dunne & Wragg (1996: 12) mengatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau suatu hasil belajar yang

diinginkan. Menurut Reiser & Dick (1996: 3) “*effective instruction is instruction that enables students to acquire specified skill, knowledge, and attitudes*”. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran tersebut terjadi perubahan-perubahan dalam diri peserta didik pada tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Fajar (2005: 17) menambahkan bahwa pembelajaran yang efektif adalah suatu proses perubahan dalam diri peserta didik yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku yang diberikan, dibimbing, dipimpin oleh seorang pendidik dengan tujuan mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual yang ada pada diri peserta didik secara tepat dan berpengaruh terhadap pola tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat, sehingga mengalami proses perubahan berupa peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku yang diberikan, dibimbing, dipimpin oleh seorang pendidik dengan tujuan mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual, secara tepat dan berpengaruh terhadap pola tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Beane et al. (1986: 142) mengatakan ada lima prinsip dalam pembelajaran yang dapat digunakan yaitu.

(1) learning is a process that involves behavior, sequwnces of events and aoucomes, (2) learning results from experiencing. The

learner must in some way act upon or react to a situation that impinges upon him, (3) learning depends upon what the learning dose. This involves how he perceives, how he thinks, how he feels and how he acts. There can be no learning unless he responds in some way, (4) the end results of a learning process in some change in the learner, demonstrable by a change in his behaviour, potential or actual, (5) the change in the learner tends to fixed in the consequences of his behaviour in terms of his own motivational.

Pendapat tersebut mengandung makna bahwa belajar adalah proses yang melibatkan perilaku, proses dan hasil. Bagi pelajar yang sedang dalam peroses belajar, dapat belajar melalui pengalaman dan situasi yang sedang dialami. Belajar tergantung pada sejauh mana seorang pelajar memahami dan merasakan, sehingga hasil akhir dari proses pembelajaran adalah adanya perubahan dalam diri seorang pelajar. Berikut ada beberapa teori tentang belajar yang dapat digunakan atau diterapkan dalam kegiatan pembelajaran.

a. Teori Belajar Behavioristik

Teori belajar behavioristik adalah teori belajar tentang perubahan tingkah laku manusia dari proses interaksi berupa pemberian dan hasil pembelajaran. Menurut Familus (2016: 113) teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan menurut Gredler (2011: 44) istilah behaviorisme merujuk pada beberapa teori yang mengandung tiga asumsi dasar belajar. 1) perilaku yang diamati menjadi fokus studi, 2) perilaku harus dipelajari melalui elemennya yang paling sederhana

(stimuli spesifik dan respons spesifik), 3) proses belajar adalah perubahan behavioral. Suatu stimulus khusus terasosiasi dengan kejadian dari suatu stimulus khusus, dan terjadi dalam kehadiran stimulus tersebut.

Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas “mimetic”, yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes (Famulus, 2016: 110). Menurut Budiningsih (2012: 29) yang digunakan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1) Menentukan tujuan pembelajaran, 2) mengidentifikasi pengetahuan awal (*entry behavior*) peserta didik, 3) menentukan materi pelajaran, 4) membagi materi yang meliputi pokok bahasan, sub pokok bahasan, topik, dan lain sebagainya, 5) menyajikan materi pelajaran, 6) memberi stimulus, 7) mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, 8) memberikan penguatan, 9) memberikan stimulus baru, 10) mengamati dan mengkaji respon, 11) memberikan penguatan lanjutan atau hukuman, 12) evaluasi hasil belajar. Sedangkan menurut Famulus (2016: 110) Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Dengan kata lain teori behavioristik tergantung pada tujuan dan instrumen dalam kegiatan belajar.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar Behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku peserta didik dalam memahami pelajaran atau suatu pengetahuan dari proses interaksi antara stimulus yang diberikan dan respon yang dilakukan oleh peserta didik. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan, proses, materi dan instrumen dalam pembelajaran.

b. Teori Belajar Gestalt

Beberapa hal penting yang dapat diambil dari teori belajar Gestalt, *Pertama*, tujuan utama belajar adalah untuk memperoleh pemahaman tentang sesuatu. *Kedua*, pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami objek pembelajaran secara totalitas, memahami unsur-unsur objek yang dipelajari, mampu mencari hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, dan mampu menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya (Sutarto, 2017:22).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teori belajar Gestalt merupakan teori belajar yang menerapkan agar peserta didik mampu memahami objek pembelajaran secara totalitas, karena dengan hal itu pembelajaran akan lebih bermakna. Tujuan dalam pembelajaran teori belajar Gestalt adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu hal.

c. Teori Belajar Deskriptif dan Preskriptif

Teori deskriptif dan preskriptif adalah teori belajar yang dimaksudkan untuk memberikan hasil dan mencapai tujuan. Menurut Reigeluth (1979: 22) bahwa “*principles and theories of instructional design may be stated in either a descriptive or prescriptive form*”. Prinsip dan teori desain instruksional dapat dinyatakan dalam bentuk deskriptif atau preskriptif. Reigeluth (Eveline & Hartini, 2014: 24) menyatakan bahwa teori preskriptif adalah *goal oriented*, sedangkan teori deskriptif adalah *goal free*. Maksudnya adalah teori pembelajaran preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil.

Selanjutnya, Eveline & Hartini (2014: 24) menjelaskan bahwa variabel yang diamati dalam mengembangkan teori-teori pembelajaran yang preskriptif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan, sedangkan dalam pengembangan teori-teori pembelajaran yang deskriptif, variabel yang diamati adalah hasil belajar sebagai efek dari interaksi antara metode dan kondisi. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dari teori preskriptif untuk mencapai tujuan dari pembelajaran, sedangkan teori belajar deskriptif untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembelajaran.

d. Teori Belajar Humanistik

Pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia

bertanggungjawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain (Arbayah, 2013: 219). Sedangkan menurut Budiningsih (2012:77) teori belajar humanistik adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis, tahap demi tahap secara ketat, sebagaimana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan secara eksplisit dan dapat diukur, kondisi belajar yang diatur dan ditentukan, serta pengalaman belajar yang dipilih untuk peserta didik mungkin saja berguna bagi guru tetapi tidak berarti bagi peserta didik.

Teori pendidikan humanistik yang muncul pada tahun 1970-an bertolak dari tiga teori filsafat, yaitu: pragmatisme, progresivisme dan eksistensialisme. Menurut Teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri (Arbayah, 2013: 219).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan tujuan pendidikan sesuai kebutuhan dan minatnya. Karena tujuan dari teori belajar humanistik adalah untuk memanusiakan manusia.

e. Teori Belajar Kognitif

Teori belajar kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Piaget setidaknya ada dua hal penting yang dapat diambil, yaitu *Pertama*, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Artinya

adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. *Kedua*, perlu adanya individualisasi dalam pembelajaran. Artinya, dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik berbeda-beda. Susunan saraf seorang akan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya umur. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik (Sutarto, 2017:21).

Menurut Pahliwandari (2016: 163) di antara teori kognitif, paling tidak ada tiga yang terkenal yaitu piaget, Bruner, dan Ausubel. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi. Sedangkan Bruner mengatakan bahwa belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan dan informasi, dan bukan ditentukan oleh umur. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahapan aktif, ikonik, dan simbolik. Sementara itu Ausubel mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan, dan menggunakan informasi.

Sedangkan menurut Sugihartono (2007: 104) menyatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil belajar, teori ini menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Hakekat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktifitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi, tidak lagi mekanistik, kebebasan dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan, agar belajar lebih bermakna bagi peserta didik.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang menitik beratkan pada proses peserta didik mendapatkan pengetahuan atau ilmu, bukan hanya berpatokan pada hasil yang diperoleh dari pembelajaran. Sehingga peserta didik dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri tanpa ada tekanan dan hambatan apapun. Karena dalam teori belajar kognitif, pada hakekatnya keterlibatan peserta didik secara aktif sangat dipentingkan.

f. Teori Belajar Konstruktivistik

Menurut pandangan konstruktivistik belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan pengetahuan harus dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik harus aktif melakukan

kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari (Sumarsih, 2009: 61). Karli & Yuliariatiningsih (2003: 2) menyatakan konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar atau perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri dan pada akhir proses belajar pengetahuan akan dibangun oleh peserta didik melalui pengalaman dari hasil interaksi dengan lingkungan.

Sugihartono (2007: 107) menyatakan bahwa peserta didik mampu mencari, menyusun sendiri pengetahuan melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu bangunan utuh. Sedangkan menurut Suparno (2001:49) secara garis besar prinsip-prinsip konstruktivisme yang diambil adalah (1) pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial; (2) pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar; (3) siswa aktif mengkonstruksi secara terus menerus, sehingga terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah; (4) guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan peserta didik harus aktif bertindak, berfikir,

membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu bangunan utuh, serta memberikan pemaknaan dari apa yang telah dipelajari.

g. Teori Belajar Sibernetik

Sani (2013: 35) mengatakan bahwa cara belajar secara sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Menurut teori ini, tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang peserta didik dengan satu macam proses belajar, namun informasi yang sama mungkin akan dipelajari peserta didik yang lain melalui proses belajar berbeda.

Sedangkan Hamid (2009: 47) menyatakan, menurut teori belajar sibernetik yang terpenting adalah “Sistem Informasi” dari apa yang akan dipelajari pembelajar, sedangkan bagaimana proses belajar akan berlangsung dan sangat ditentukan oleh sistem informasi tersebut. Oleh karena itu, teori ini berasumsi bahwa tidak ada satu jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang menerapkan proses untuk memperoleh suatu pengetahuan peserta didik, ditentukan oleh sistem

informasi, karena sistem informasi sangat menentukan cara belajar peserta didik.

Dari berbagai teori belajar yang ada, penelitian ini lebih menggunakan teori belajar behavioristik yaitu teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku terkait kesadaran politik peserta didik dalam memahami pelajaran atau suatu pengetahuan yaitu pendidikan politik dari proses interaksi antara stimulus yang diberikan dan respon yang dilakukan oleh peserta didik.

4. Tinjauan tentang Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Winataputra (2012: 249) mengatakan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian psikologis dan sosial-kultural kewarganegaraan individu yang menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi, diperkaya dengan disiplin ilmu lainnya yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Danišková & Lukšik (2017: 59) mengatakan bahwa "*citizenship education is not just about the nature of the curriculum but also about broader extra-curricular activities and about the direct, or implicit, instruction provided by teachers*".

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengenai sifat kurikulum, tetapi juga tentang kegiatan ekstra kurikuler yang lebih luas

dan tentang instruksi langsung, atau implisit, yang diberikan oleh guru. Sedangkan menurut Syarbaini (2010: 4) pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu politik, dan disiplin ilmu yang relevan secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural, dan kajian ilmiah kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berkaitan dengan karakter seorang individu atau karakter seorang warga negara yang memiliki sikap demokratis, kritis, dan bermoral. Seperti yang diungkapkan oleh Azra (2009: 7) bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar seseorang dapat mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy*, dan *political participation*, serta kemampuan mengambil keputusan yang rasional.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian psikologis dan sosial-kultural yang berlandaskan ilmu politik, pendidikan dan disiplin ilmu yang relevan secara koheren diorganisasikan melalui lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana agar seseorang dapat mempelajari orientasi, sikap,

dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik serta kemampuan mengambil keputusan yang rasional.

Chavez (2016:206) berpendapat bahwa *citizenship education is one component of education that is particularly geared towards teaching students the rights and responsibilities they have as members of their nation and communities.*

Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu komponen pendidikan yang secara khusus diarahkan untuk mengajarkan siswa hak dan tanggung jawab yang mereka miliki sebagai anggota bangsa dan komunitas mereka. Menurut Taniguchi & Nakano (2017: 767) “*citizenship education has many good practice to develop students political literacy*”. Pendidikan kewarganegaraan memiliki banyak praktik yang baik untuk mengembangkan literasi politik siswa.

Sedangkan menurut Wintersteiner et al. (2015 :25) *civic education is conceived as the promotion of theoretical and practical abilities for the critical reflection of political and power relationships and conveys a comprehensive understanding of rights and fundamental democratic values, such as equality, freedom, tolerance or dealing with diversity.*

Pendidikan kewarganegaraan adalah konsep yang dianggap sebagai promosi kemampuan teoritis dan praktis yang berbasis politik dan kekuasaan dan memiliki pemahaman mendasar tentang nilai-nilai demokrasi, seperti kesetaraan, kebebasan, toleransi atau berurusan dengan keragaman. Arendse & Smith (2018: 47) berpendapat bahwa “*citizenship education rooted in knowledge, understanding, skills and*

competencies, develops capabilities for responsible participation in political, socio economic and cultural life”.

Pendidikan kewarganegaraan berakar pada pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kompetensi, mengembangkan kemampuan untuk partisipasi yang bertanggung jawab dalam kehidupan politik, sosial-ekonomi dan budaya. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Girón (2016: 142) *“that a critical multicultural citizenship education must have a strong political orientation and, additionally, be responsive to the existing social and cultural diversity that defines our democratic community”*. Pendidikan kewarganegaraan multikultural yang kritis harus memiliki orientasi politik yang kuat dan, selain itu, responsif terhadap keragaman sosial dan budaya yang ada mendefinisikan komunitas demokratis kita.

In general, citizenship education was viewed in broad terms, as process-orientated learning, directed at participation in all aspects of society, including party politics, volunteering, business and social life (Niens & McIlrath, 2010:77).

Secara umum, pendidikan kewarganegaraan dipandang secara luas, sebagai pembelajaran yang berorientasi pada proses, diarahkan pada partisipasi dalam semua aspek masyarakat, termasuk politik partai, sukarelawan, bisnis, dan kehidupan sosial.

Pendidikan kewarganegaraan memuat pengetahuan tentang ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan menampilkan fakta, konsep, pengertian dan teori-teori yang dikembangkan dari ilmu politik, hukum, dan

kewarganegaraan. Seperti yang diungkapkan oleh Patrick et al. (2011: 41) bahwa:

Knowledge of citizenship and government in democracy (civic knowledge): a) concepts/principles on the substance of democracy, b) issues about the meaning and implementation of core ideas, c) constitutions and institutions of representative democratic government, d) organization and functions of democratic institutions, e) practices of democratic citizenship and the roles of citizens, f) contexts of democracy: cultural, social, political, and economic, g) history of democracy in particular state and throughout the world.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Pastarmadzhieva. (2015:20) *“the most important instrument for political knowledge formation is the civic education taught in schools”*. Instrumen paling penting untuk pembentukan pengetahuan politik adalah pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah. Menurut Banks (2017: 367) *“typology of citizenship that consists of (a) failed citizenship, (b) recognized citizenship, (c) participatory citizenship, and (d) transformative citizenship”*. Tipologi kewarganegaraan terdiri (a) kewarganegaraan yang gagal, (b) kewarganegaraan yang diakui, (c) kewarganegaraan partisipatif, dan (d) kewarganegaraan transformatif. Maka dari itu kita sebagai warga Negara harus dapat mengembangkan kecakapan, membentuk watak dan memposisikan diri dengan baik.

Kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*) dikembangkan melalui pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk aktif di masyarakat, mengawasi suatu kebijakan pemerintah, mentaati suatu kebijakan yang telah ditetapkan, dan meningkatkan kesadaran politik

dalam kehidupan bermasyarakat. Patrick et al. (2011: 41) berpendapat bahwa:

Participatory skills of citizenship in a democracy (participatory civic skills): a) interacting with other citizens to promote personal and common interests, b) monitoring public events and issues, c) deliberating and making decisions about public policy issues, d) influencing policy decisions on public issues, e) implementing policy decision on public issues, f) taking action to improve political/civic life.

Sedangkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) memuat tentang a) Menunjukkan hal-hal baik, b) mengakuhi hak asasi manusia, c) menghormati hak asasi setiap individu, d) berpartisipasi dalam kehidupan politik atau bermasyarakat, e) Menghormati, melindungi, dan mempraktekkan kebijakan pemerintah yang telah disetujui bersama rakyat, f) mendukung dan mempraktikkan kebijakan umum.

Seperti yang diungkapkan oleh Patrick et al. (2011: 41)

civic disposition: a) promoting the common good, b) affirming the common and equal humanity and dignity of each person, c) respecting, protecting, and using rights possessed equally by each person, d) participating responsibly in the political/civic life of the community, e) respecting, protecting, and practicing government by consent of the people, f) supporting and practicing civic virtues.

Patrick et al. (2011: 53) *habits of the hearts, as Alexis de Tocqueville called civic dispositions, are necessarily intertwined with civic knowledge and civic skills component of democratic citizenship. Education for democratic citizenship requires the development of those traits of public private character that compel citizens to exercise the rights and responsibilities of democratic citizenship and promote the common good.*

Alexis de Tocqueville mengatakan karakter kewarganegaraan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Pendidikan warga Negara yang demokratis memerlukan pengembangan sifat-sifat karakter kepribadian yang mengharuskan untuk melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dan memberikan kebaikan bersama. Sedangkan menurut Yumoto, H. (2017: 43) *“that development education should be expanded to democratic citizenship education to nurture active citizens with global perspectives”*. Bahwa pendidikan pengembangan seharusnya diperluas ke pendidikan kewarganegaraan demokratis untuk membina warga aktif dengan perspektif global.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang jujur, cerdas, bermoral, berkarakter, demokratis dan bertanggung jawab. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 (2014: 221) menerangkan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77 K Ayat (2) Huruf B dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pendapat dari para ahli tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yaitu seperti yang diungkapkan oleh Jazim & Mustafa (2010: 80) bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bertujuan untuk. *Pertama*, membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik baik ditingkat daerah, nasional, dan global. *Kedua*, menjadikan warga negara yang baik, dan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera dan demokratis. *Ketiga*, menghasilkan peserta didik yang berfikir komprehensif, analitis, kritis, dan bertindak demokratis. *Keempat*, mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan mengambil keputusan serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik. *Kelima*, mampu membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta dapat memecahkan berbagai persoalan actual kewarganegaraan.

Menurut Biesta (2011: 24) *“purpose of education for citizenship is described as to prepare young people for political, social, economic, cultural and educational participation in society”*. Tujuan pendidikan kewarganegaraan digambarkan sebagai untuk mempersiapkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam politik, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Ramazan & Ezzlam (2017: 803) *“active citizenship education involves three main interrelated qualities. These are social and moral responsibility, social participation and political consciousness”*. Pendidikan kewarganegaraan aktif melibatkan tiga kualitas utama yang saling berkaitan. Ini adalah tanggung jawab sosial dan moral, partisipasi sosial dan kesadaran politik. Sedangkan Report (2017:9) berpendapat bahwa:

...the purpose of citizenship education is fostering harmonious coexistence and the development of mutually beneficial individuals and the communities in which they belong. In a democratic society, citizenship education supports students to be active, informed and responsible citizens who are willing and able to take responsibility for themselves and for their communities at the local, regional, national and international levels.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membina kerukunan yang harmonis dan pengembangan individu-individu yang saling menguntungkan dan masyarakat setempat. Dalam masyarakat demokratis, pendidikan kewarganegaraan mendukung siswa untuk menjadi warga negara yang aktif, terinformasi dan bertanggung jawab yang mau dan mampu mengambil tanggung jawab untuk diri mereka

sendiri dan untuk komunitas mereka di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Menurut Muchson dan Samsuri (2015: 117) pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan upaya pedagogis yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yang memuat materi pemerintahan, kewargaan dan sejarah atau kebangsaan. Pendapat yang sama disampaikan oleh Kaelan (2016: 3) bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap warganegara yang cinta tanah air. Melalui penelitiannya Galston (2007: 639-640) menyatakan pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di sekolah sangat penting dalam menentukan karakter kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menyiapkan, membina dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan dasar peserta didik yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan juga tanggungjawab sebagai warga negara yang baik berdasarkan Pancasila (Darmadi, 2012: 97). Sementara itu Karagrorgiou (2016: 14) berpendapat bahwa:

Leaders in early childhood education should strengthen and support democratic citizenship education in order to recognize and promote multiple cultural and linguistic identities and accommodate growing interest of global issues within a wider notion of a freedom of choice with respect to diversity.

Seorang pendidik pada pendidikan anak usia dini harus memperkuat dan mendukung pendidikan kewarganegaraan yang

demokratis dalam rangka untuk mengenali dan mempromosikan banyak identitas budaya dan bahasa dan mengakomodasi meningkatnya minat isu-isu global dalam pengertian yang lebih luas tentang kebebasan memilih sehubungan dengan keragaman.

The cultural dynamic of ability expectations and ableism (not only expecting certain abilities, but also perceiving certain abilities as essential) was one factor that has and will continue to shape citizenship and citizenship education. It focuses on three areas of citizenship education: (a) active citizenship; (b) citizenship education for a diverse population; and (c) global citizenship (Wolbring, 2012: 150).

Dinamika budaya dari harapan dan kemampuan kemampuan (tidak hanya mengharapkan kemampuan tertentu, tetapi juga menganggap kemampuan tertentu sebagai hal yang penting) adalah salah satu faktor yang telah dan akan terus membentuk kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini berfokus pada tiga bidang pendidikan kewarganegaraan: (a) kewarganegaraan aktif; (b) pendidikan kewarganegaraan untuk populasi yang beragam; dan (c) kewarganegaraan global.

Berdasarkan buku guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2017: 20-21) secara umum tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni. (1) Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung

jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*). (2) Pengetahuan kewarganegaraan. (3) Keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus tujuan PKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut dimaksudkan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. (1) Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial. (2) Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Berpikir secara kritis, rasional, kreatif serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya. Tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan bertumbuhkembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif, sebagai cerminan dan pengejawantahan nilai, norma dan moral Pancasila. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , 2017: 21)

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, berkarakter, demokratis, amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik

Materi-materi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan pendidikan politik, tersusun dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Secara umum pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan paradigma baru dalam pengembangan kurikulum, memberikan

kebebasan penuh pada setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan dan mengefektifkan proses pembelajaran, dalam hal ini yaitu proses pembelajaran pendidikan politik.

Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PKn SMA/MA Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

KELAS XI	KELAS XII
STANDAR KOMPETENSI	STANDAR KOMPETENSI
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia	2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik	2.1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia	2.2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia
1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik	2.3 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain
1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	

Sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2006.

Bedasarkan rincian materi di atas yang memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara garis besar memiliki relevansi terhadap pendidikan politik yaitu dengan materi konsep dasar warga negara, hak dan kewajiban warga negara, multi kulturalisme, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia sebagai negara persatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka

Tunggal Ika, sistem politik di Indonesia, budaya politik di Indonesia, dan sistem pemerintahan Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik, materi wajib yang harus diberikan meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Metode dan Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik

Metode merupakan sarana untuk menyampaikan suatu pengetahuan dalam pendidikan, yaitu digunakan untuk menyampaikan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, tidak terlepas juga pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terkadang materi pelajaran yang mudah pun bisa terasa sulit tersampaikan oleh peserta didik, karena metode yang digunakan tidak tepat. Namun, sebaliknya materi pelajaran yang dirasa sulit, akan terasa mudah diterima oleh peserta didik, karena cara menyampaikan dan metode yang digunakan mudah dipahami, tepat dan menarik. Sehingga metode dalam pembelajaran ini sangatlah berpengaruh terhadap penerimaan bagi peserta didik. Sehingga kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran tercapai.

Seperti yang disampaikan oleh Maesaroh (2013: 167) metode pembelajaran merupakan media transformasi dalam pembelajaran, agar kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran tercapai. Metode yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan akan

merangsang minat dan motivasi peserta didik, dengan motivasi yang kuat, maka prestasi belajar akan meningkat.

Metode dalam pembelajaran memiliki berbagai jenis atau macam, yaitu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Gafur (2012: 79) jenis-jenis yang umumnya digunakan dalam proses pembelajaran antara lain, pengajaran dengan bantuan computer, demonstrasi, observasi, diskusi, debat, dramatisasi, latihan (*drill*), percobaan (*eksperimen*), pengalaman lapangan (*field experience*), permainan (*gaming*), studi independen (*independent study*), pengalaman laboratorium, kuliah atau ceramah, mendengarkan, manipulasi dan meraba, model dan tiruan, diskusi panel, praktikum, pemecahan masalah, pengajaran terprogram, tutorial, pengajaran melalui TV, pengajaran melalui program radio, seminar, simulasi, proyek, portofolio dan magang. Metode-metode tersebut, tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dalam hal ini guru atau tenaga pendidik harus jeli dalam menggunakan metode pembelajaran yang tepat bagi suatu pembelajaran.

Metode yang tepat dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang baik, cerdas dalam bersikap dan berfikir ilmiah (*scientific*), yaitu pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berfikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, solutif,

dan mengaplikasikan materi pembelajaran dengan melibatkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Adapun metode-metode yang diterapkan sebagai berikut.

a. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh seorang guru terhadap siswa di kelasnya (Mansyur, 1991:138-139). Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa metode ceramah merupakan salah satu metode yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan atau menjelaskan suatu materi secara lisan sehingga ada interaksi antara guru dan peserta didik. Karena metode ceramah dapat meningkatkan penerimaan (receiving) dan memudahkan peserta didik untuk memahami sesuatu. Seperti yang diungkapkan oleh Amaliyah., dkk, (2014: 128) bahwa metode ceramah dapat meningkatkan aspek penerimaan (receiving) yang cukup berarti dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar.

Dengan beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa metode ceramah merupakan metode pengajaran yang efektif untuk menyampaikan suatu materi pelajaran kepada peserta didik. Metode ceramah yang digunakan oleh guru PKn SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta adalah metode ceramah bervariasi, yaitu diawal proses pembelajaran guru menyampaikan materi

secara lisan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan maksud seberapa jauh peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan, diakhir pembelajaran guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Materi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah fahami dan ringkas, agar peserta didik dapat menerima dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang ungkapkan oleh Novita (2014: 202) metode ceramah yaitu metode dengan metode tanya jawab, pemberian tugas, latihan dan demonstrasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kondusif dengan menggunakan multiple set dapat digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam belajar.

b. Metode Presentasi

Menurut Sutomo (2007: 1) presentasi merupakan sebuah kegiatan aktif dimana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Sedangkan menurut Triwahyuni & Kadir (2004: 1) presentasi merupakan kegiatan yang penting dalam mengkomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan, misalnya untuk menarik audiensi agar membeli produk, menggunakan jasa, atau untuk kepentingan orang lain. Dari berbagai pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa metode presentasi adalah sebuah metode pembelajaran yang melibatkan

penyaji dalam hal ini peserta didik untuk berperan aktif untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan suatu ide, konsep, gagasan, dan informasi kepada audiens sehingga tertarik atau mengerti apa yang disampaikan.

Metode presentasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran merupakan metode yang sering dipakai oleh guru untuk menyampaikan suatu materi, maupun peserta didik untuk memaparkan tugas yang telah diberikan. Media yang sering digunakan dalam presentasi yaitu Laptop dan LCD Proyektor, adapun software yang sering digunakan adalah powerpoint. Penggunaan metode presentasi bertujuan untuk melatih diri peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat, mempertahankan argumentasi, dan belajar menggunakan public speaking yang baik. Selain itu, metode presentasi dengan menggunakan powerpoint dapat menghilangkan kejenuhan, karena disajikan dengan gambar, font, dan efek yang menarik, sehingga meningkatkan antusiasme peserta didik atau audiens.

c. Metode Diskusi

Menurut Hasibuan & Moedjiono, (2002:20) diskusi merupakan suatu proses penglihatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah tertentu melalui cara tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah.

Hasibuan & Moedjiono, (2002:20) juga menambahkan bahwa metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, kesimpulan atau pemecahan suatu masalah. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada para peserta didik melakukan interaksi, berbincang, tukar menukar pendapat, dan informasi untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

Metode diskusi dilakukan dengan cara membagi atau membentuk peserta didik menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Setiap kelompok diberikan suatu materi atau persoalan yang harus diselesaikan secara bersama sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan, kemudian hasil diskusi dipaparkan di depan kelas secara bergantian dan mendapat tanggapan dari kelompok lain. Metode diskusi bertujuan untuk melatih diri peserta didik untuk berani berargumentasi, menghargai pendapat orang lain, kerjasama, solidaritas, dan bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan atau dinyatakan.

d. Metode Bermain Peran

Metode bermain peran merupakan metode pembelajaran yang melibatkan para peserta didik secara langsung, peserta didik

memposisikan perannya masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan metode ini harapannya dapat memberikan pemahaman yang efektif dalam menyampaikan suatu materi. Menurut Dananjaya (2011: 122) metode bermain peran (role playing) merupakan metode pembelajaran yang menggambarkan tentang suatu kondisi atau paradigm tertentu pada suatu hal yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari metode pembelajaran bermain peran adalah untuk memudahkan para peserta didik untuk menerima materi yang akan disampaikan. Menurut Amri, dkk (2010: 194) tujuan dari metode bermain peran (role playing) yaitu mencoba mengeksplorasi hubungan-bubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga para peserta didik secara bersama-sama dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan berbagai pemecahan masalah.

e. Metode Debat

Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang melatih siswa untuk saling menyampaikan argumentasi, mengaktualkan diri untuk mempertahankan pendapat yang telah disampaikan mengenai suatu pokok permasalahan yang dipertentangkan. Menurut Hendrikus (2009: 120) debat pada hakekatnya merupakan saling adu argumentasi antarpribadi atau

kelompok manusia, dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak.

Tujuan dari metode debat yaitu untuk mengajarkan siswa untuk berani menyampaikan argumentasi yang memiliki landasan atau acuan, untuk memecahkan suatu persoalan yang dipertentangkan dengan cara demokratis atau saling menghargai pendapat orang lain. Aspek-aspek yang harus ada pada metode debat yaitu pertama, yaitu tema atau permasalahan yang akan didebatkan, tema haruslah memiliki unsur yang kontroversial sehingga menarik untuk dipertentangkan. Kedua yaitu moderator, berperan sebagai memimpin jalannya perdebatan, peran moderator hanya sebatas pelaksana proses perdebatan, tidak memiliki kuasa untuk menginterfensi salah satu kelompok, harus netral atau independen, sehingga proses perdebatan berjalan dengan baik.

Ketiga, peserta debat, peserta debat memiliki peran utama dalam proses perdebatan, bisa terdiri dari perorangan atau kelompok. Mereka menyampaikan argumentasi secara kuat, mempertahankan, dan menyanggah pendapat dari lawan sehingga dapat menyakinkan para pendengar bahwa argementasi yang disampaikan merupakan argumentasi yang logis, faktual dan benar. Keempat, yaitu pendengar debat atau penonton, para pendengar merupakan bagian tak terpisahkan yang harus ada pada proses bedat, karena para pendengan berperan sebagai saksi perdebatan,

sehingga dapat membuktikan bahwa pihak yang menang dan kalah. Kelima, yaitu waktu. Waktu dalam perdebatan harus ditentukan secara baik dan jelas, sehingga proses suatu perdebatan berjalan dengan efektif.

f. Metode Penugasan

Metode penugasan merupakan bagian dari proses kegiatan belajar mengajar, dalam metode diskusi, ceramah, debat maupun presentasi terkadang disisipi dengan pemberian tugas tertentu untuk mencari bahan/ materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, pemecahan masalah, atau sekedar mencari makna dan istilah yang belum difahami. Penugasan bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Penugasan secara individu biasanya berbentuk pengerjaan soal pilihan ganda atau esay, pencarian makna atau istilah tertentu, membuat karya tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan penugasan secara kelompok biasanya berbentuk pembuatan kliping, makalah, artikel atau karya tulis tertentu.

Metode penugasan memiliki dua macam bentuk, penugasan terstruktur dan penugasan tidak terstruktur. Penugasan terstruktur adalah bentuk penugasan yang waktunya sudah ditentukan atau sudah terjadwal sebelumnya. Sedangkan penugasan tidak terstruktur adalah bentuk penugasan yang waktunya belum ditentukan sebelumnya atau disepakati dalam proses pemberian

tugas saat itu. Tujuan dari dilakukannya metode penugasan adalah agar peserta didik terlatih untuk mandiri, bertanggung jawab, bekerja sama, mengukur tingkat kefahaman atau pengetahuan dari materi yang telah diajarkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran. Model tersebut merupakan suatu pola umum dalam pembelajaran dengan tujuan mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diharapkan. Model pembelajaran merupakan pola interaksi guru dan peserta didik di dalam kelas terkait dengan pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Istarani (2011: 1) model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang digunakan secara langsung atau tidak dalam proses belajar. Sementara itu menurut Fathurrahman (2015: 29) model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan pembelajaran yang meliputi mendeskripsikan dan menggambarkan prosedur secara sistematis berdasarkan pengalaman untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model pembelajaran memiliki jenis atau macam variasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, yaitu seperti yang diungkapkan

oleh Majid (2013: 19) terdapat 5 model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu. (1) belajar tuntas (*mastery learning*), (2) belajar control diri (*learning self control*), (3) latihan pengembangan keterampilan dan konsep diri (*learning for skill and concept development*), (4) latihan assertif, dan (5) pembelajaran langsung (*explicit instruction*).

Model pembelajaran yang cocok untuk menyampaikan materi pendidikan politik dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan cenderung pada pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pemecahan masalah-masalah politik yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga secara tidak langsung siswa memperoleh pengetahuan politik sekaligus keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Selain itu, pembelajaran kooperatif juga dinilai cocok untuk digunakan dalam menyampaikan materi pendidikan politik. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran berbasis kelompok untuk mengkonstruksi konsep dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sehingga harapannya dengan model pembelajaran kooperatif siswa mampu mengkonstruksikan konsep politik dan mampu untuk mencari solusi dari permasalahan tentang politik.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan referensi dan penguat argumen, penelitian ini mengkaji beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahgfiroh (2017: 357-368) dengan tema Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Yogyakarta termuat dalam kurikulum yang diterapkan sekolah, yakni dalam kurikulum 2013 (K13) maupun dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Di kurikulum 2013, materi pendidikan politik antara lain: Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Di kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) materi pendidikan politik antara lain: Pancasila, konstitusi, peraturan perundang-undangan, demokrasi, kedaulatan, bela negara, otonomi daerah, dan globalisasi.

Metode pembelajaran yang digunakan yakni dengan ceramah, presentasi, diskusi, pemeberian tugas, *make a match*, portofolio, *mind mapping*, pohon kreatif, teka-teki, klipng dan *modeling*. Hambatannya meliputi: a) sarana dan prasarana, b) organisasional, terbatasnya forum-forum

dan lomba-lomba khusus pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, c) anggaran, d) waktu, e) perbedaan karakter dan partisipasi dari peserta didik. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mahgfiroh dengan penelitian dari peneliti yaitu implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Mahgfiroh dilakukan di SMP Negeri 2 Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan di SMA Islam terpadu Abu Bakar Yogyakarta.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hemafitria & Rianto (2015: 175-189) dengan tema pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik pemilih pemula. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) fenomena nyata pembinaan pemilih pemula melalui pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik dilaksanakan dengan: (a) membangun sikap demokratis, (b) memberikan pemahaman tentang partisipasi aktif pemilih pemula sebagai warga negara untuk memberikan hak pilihnya, (c) memperkenalkan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, (d) memberikan arahan kepada siswa untuk memberikan pilihan sesuai dengan hati nurani. (2) Langkah nyata pembinaan pemilih pemula menghadapi pelaksanaan pemilihan Presiden tahun 2014 melalui pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik di sekolah dilakukan dengan: (a) Mengingatkan siswa (pemilih pemula) untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilpres 2014, (b) Menyelenggarakan diskusi kelas dengan tema politik, (c) memberikan kesempatan kepada pemilih pemula untuk mengikuti kegiatan politik seperti ikut berpartisipasi dalam

debat politik di lingkungan pelajar, dan menjadi member/anggota pada sebuah organisasi politik, (d) memberikan kesempatan pada pemilih pemula untuk turut serta dalam aksi politik seperti mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang diikuti.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hemafitria & Rianto dengan penelitian dari peneliti yaitu pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Hemafitria & Rianto menitikberatkan pada pendidikan politik pemilih pemula, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menitikberatkan pada penguatan kesadaran politik siswa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Saputro & Nasiwan (2016: 13-14) dengan tema peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan organisasi siswa intra sekolah sebagai pendidikan politik di sekolah menengah pertama Negeri se-Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa untuk melaksanakan peranannya sebagai pengembang pendidikan politik, guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih melakukannya pada saat pembelajaran PKn di kelas dengan berbagai macam metode pembelajaran. Peranan guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan pengasih dalam pengembangan OSIS sebatas memberikan pengarahan dan motivasi kepada siswa agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan OSIS.

Kendala yang ditemukan dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik, guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih yaitu

sebagian guru PKn belum memahami konsep pendidikan politik, sulitnya menanamkan nilai-nilai politik kepada siswa, sulitnya membangun keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat, kurangnya koordinasi antar guru di sekolah untuk mengembangkan OSIS sebagai pendidikan politik, kurangnya kehadiran guru PKn di sekolah masing-masing, kurangnya partisipasi guru PKn dalam kegiatan-kegiatan OSIS dan kurangnya pembinaan mengenai pendidikan politik terhadap pengurus OSIS.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Saputro & Nasiwan dengan penelitian dari peneliti adalah tentang pendidikan politik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Saputro & Nasiwan menitikberatkan pada kesadaran Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengembangan Organisasi Siswa Intra Sekolah Sebagai Pendidikan Politik di Sekolah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menitikberatkan pada pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta.

- a. Bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan politik melalui PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan politik melalui PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?
 - c. Bagaimana penilaian hasil pembelajaran pendidikan politik melalui PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?
2. Kesadaran politik siswa setelah mendapatkan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta.
- a. Bagaimana kesadaran politik siswa setelah mendapatkan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?
 - b. Penguatan kesadaran politik seperti apa yang didapatkan siswa setelah mendapatkan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?
3. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta.
- a. Kendala apa yang dihadapi oleh guru pada pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?

- b. Kendala apa yang dihadapi oleh siswa pada pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta?